

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Daud Busroh. *Imlu Negara*: Jakarta. Sinar Grafik, Cet keenam. 2011.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta. Rajawali pers. 2015.
- Asshiddiqie, J dan Syafaat, M. Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Asshiddiqie, J. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan keempat*, Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. 2002.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkmah Konstitusi. 2002.
- Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*. Jakarta. Konstitusi Pres. 2005.
- Asshiddiqie, J. *HTN dan Pilar Pilar Demokrasi*. Jakarta. Konstitusi Press. 2006.
- Asshiddiqie, J. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta Gramedia. 2007.
- Asshiddiqie, J. Dan Sahrizal, A. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta. Konpress. 2006.
- Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers. 2010.
- Buchori, M. *Indonesia Mencari Demokrasi*. Yogyakarta. INSIST Press. 2005

- Dahl, Robert, A. Dilema Demokrasi Pluralis. Jakarta. Rajawali. 1982.
- Kelsen, H. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung. Nusa Media. 2006.
- Lili Rasjidi. Filsafat Hukum Mazhab dan refleksinya. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset. 1994
- Madani, A. Malik. Berpayung fiqih. Yogyakarta. Pustaka Pesantren. 2010.
- Mafhud, M.D. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta. Pustaka LP3S Indoneisa. 2007
- Mahkamah Konstitusi. Laporan Tahunan 2020 Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi. Jakarta. Kepaniteraan dan Sekretraiat Jendral Mahkamah Konstitusi. 2020.
- Marjuki, Mahmud, P. Penleitian Hukum. Jakarta. Parnanda Media. 2015
- Martitah. Mahkamah Konstitusi dan konstiusionalitas Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. 2010
- Martitah. Mahkamah Konstitusi dari negative legislature ke positive legislature. Jakarta. Konstitusi Press. Cetakan Pertama. 2013
- Miriam Budiardjo. Dasar dasar ilmu politik, Jakarta: Nusa media. 2010
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Samsul Wahidin. Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2008.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 1989
- Suharizal. 2011. Pilkada Regulasi Dinamika dan Konsep Mendatang. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Surjono, Soekamto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Universitas

Indonesia. Press. Cetakan ketiga. 1986.

Theo Hiujbers. Filsafat Hukum. Yogyakarta. Kanisius. 1995

### **Undang-undang**

BPHN RI, Putusan No. 97/PUU-XI/2013... h. 65-68.

Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 85/PUU- XX/2022

Perwal Kota Serang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perpu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

### **Jurnal / Tesis/ Artikel**

Nazriyah. 2015. Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 The Dispute Solution of The Election Regional Leader After Constitutional Court Decision. Jurnal Konstitusi. Volume 12, Nomor 3, September 2015.

Kambo, Gustiana A., dan Achmad Zulfikar. 2015. Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak. Makassar: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.s

Bambang.2016. Penyelesaian sengketa pilkada serentak 2015 dalam perspektif electoral justice system. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 2 No. 1, Jan 2016.

[http://www.hukumonline.com/ Cerita](http://www.hukumonline.com/Cerita) tentang sengketa pilkada diakses pada 16 September 2023.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11647>. Polemik sengketa pilkada, diakses pada 18 Juli 2023

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa-pilkada.html>. Ambag batas sengketa pilkada diakses pada 10 Desember 2023.